



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, SENIN 7 AGUSTUS 2023



RINGKASAN BERITA HARI INI



SERIOUS: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyampaikan nota penjelasan KUAPPAS Perubahan APBD 2023.

Bahas Perubahan APBD, Ada Peningkatan 1 Persen

KOTA-Kalangan legislatif dan eksekutif mulai membahas Perubahan APBD 2023. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyampaikan nota penjelasan mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan APBD 2023 dalam rapat paripurna.

Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu mengatakan, terdapat perubahan pada beberapa sektor anggaran yang dilakukan secara wajar. "Mengikuti kondisi dan kebutuhan keuangan daerah," katanya.

Anggaran pendapatan mengalami kenaikan dari Rp 4,7 triliun

● Ke Halaman 10

DISPERINDAG



DIKY PUTRA SANSIRI/RADAR SIDOARJO

REVITALISASI: Kondisi depan Pasar Larangan pasca relokasi pedagang pancakan.

Apresiasi Langkah Tegas Penertiban Pasar Larangan

KOTA-Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi atas tindakan tegas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan TNI-Polri yang sukses melakukan relokasi pedagang di Pasar Larangan.

Choirul Hidayat, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo menyatakan bahwa langkah tegas Satpol PP dalam merelokasi pedagang yang berjualan di blok sisi timur Pasar Larangan telah tepat dilakukan. "Apa yang dilakukan petugas Satpol PP ini sudah benar dan patut diapresiasi," ujarnya.

● Ke Halaman 10

PLN Energize IBT 2 GITET 500 kV Krian untuk Perkuatan Interkoneksi Jawa-Bali

KRIAN—Strategi penguatan keandalan sistem kelistrikan interkoneksi Jawa-Bali berhasil dilakukan PLN Unit Induk Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) pada pekerjaan penggantian Interbus Transformer (IBT) 2 Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Krian. Pekerjaan dilakukan sebagai komitmen PLN dalam memastikan peralatan berfungsi optimal dalam mengantisipasi potensi munculnya gangguan pada sistem kelistrikan. Mengingat IBT 2 telah beroperasi sejak 1997, sehingga dalam perencanaannya, pekerjaan ini telah melalui kajian dan perhitungan sistematis. General Manager PLN UIT JBM, Didik Fauzi Dakhlan mengatakan pekerjaan berhasil diselesaikan jauh lebih cepat dari target yang diperkirakan. "Penggantian IBT 2 GITET 500 kV Krian perlu dilakukan sebagai komitmen menghadirkan keandalan sistem interkoneksi Jawa-Bali. Saat asesmen ditemu-kan adanya performa yang me-



nurun pada IBT 2 karena usia operasionalnya yang sudah cukup lama. Semoga dengan kembali beroperasinya IBT 2 yang baru ini, performa sistem semakin andal dan pelayanan listrik untuk pelanggan terjaga aman," papar Didik. Pekerjaan penggantian IBT 2 GITET 500 kV Krian dengan pemberian tegangan (energize) berhasil dilakukan pada Rabu (2/8) pukul 22:33 WIB. Lebih cepat dari rencana yang awalnya selesai pada tanggal 7 Agustus 2023.

PLN berhasil menghemat konsumsi BBM untuk peker-

KOMITMEN: Tim PLN saat berhasil mengerjakan penggantian IBT 2 GITET 500 kV, Rabu (2/8).

jaan ini. Jika dikalukulasi biaya operasional pekerjaan 1 hari sebesar Rp3 miliar, maka kami dapat berhemat sejumlah kurang lebih Rp15 miliar karena kami lebih cepat 5 hari dari target awal," ungkap Didik.

Lebih lanjut Didik juga menyebutkan dengan beroperasinya kembali IBT 2 GITET 500 kV Krian yang merupakan salah satu trafo step down yang menyuplai listrik ke wilayah Gresik, Surabaya, Mojokerto, dan Jombang, PLN memastikan performa peralatan dapat kembali berfungsi optimal dalam sistem kelistrikan. (*)

● Ke Halaman 10



MINAT BACA: Kepala Dispendikbud Sidoarjo Tirto Adi (dua dari kiri) saat menghadiri peresmian perpustakaan ramah anak di SDN Tebel.

Sebarkan Virus Literasi, Dorong Perpustakaan Ramah Anak

GEDANGAN—Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mutiara Rindang terus mendorong sekolah di Sidoarjo untuk melekat dalam literasi. Kali ini giliran SDN Tebel di Kecamatan Gedangan yang resmi membuka perpustakaan ramah anak, Jumat (4/8). Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo. Kepala Dispendikbud Sidoarjo Tirto Adi sangat mensupport akan pembukaan perpustakaan ramah

anak. Sebab perpustakaan semacam itu sudah banyak menyasar sekolah tingkat dasar di Sidoarjo. "Ini merupakan hasil kerja sama dengan LSM Mutiara Rindang. Karena itu, kerja sama ini harus bisa benar membawa manfaat. Kami serius membangun perpustakaan untuk anak-anak Sidoarjo," jelasnya. Berdirinya perpustakaan membuat-nya berharap literasi dan numerasi anak-anak Kota Delta meningkat.

● Ke Halaman 10

**Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Belalang Harum Bikin Hasil Panen Berlimpah

SIDOARJO – Kisah Anggaswangi melibatkan belalang, Nyai Sinto alias Mbah Sapujagat, dan masyarakat yang bekerja sebagai petani.

Kepala Dusun Kweni, Desa Anggaswangi, Sumarli menuturkan bahwa nama Anggaswangi sudah ada jauh sebelum dirinya lahir pada 1958. "Menurut arsip desa, Anggaswangi itu sebagai perwujudan dari peristiwa pada 26 September 1826," ucapnya kemarin (6/8).

Pada tanggal itu, katanya, ada seorang pendatang yang bernama Nyai Sinto yang masyhur dipanggil Mbah Sapu Jagat. Pada suatu hari, padi yang ditanamnya diserang hama walang atau belalang. "Namun, anehnya walang itu baunya wangi, tidak sangit seperti walang pada umumnya," lanjut Sumarli.

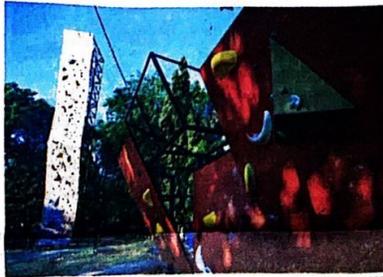
Untuk mengusir hama tersebut, akhirnya Mbah Sapu Jagat beserta warga mengadakan ritual "ruwat desa" atau biasa disebut sedekah bumi. Bukannya hama hilang, walang itu justru semakin menjadi dan banyak yang datang hingga menyebar ke sawah petani lainnya. "Entah mungkin kehendak Yang Kuasa, padi milik warga juga ikutan wangi, bahkan hasilnya melimpah," ucap bapak dua anak itu.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya peristiwa walang yang berbau wangi tersebut dijadikan nama desa. "Anggas itu nama lainnya walang, sedangkan wangi itu baunya dan jadilah Desa Anggaswangi," kata Sumarli.

Setelah meninggal, Nyai Sinto atau Mbah Sapu Jagat itu dimakamkan di wilayah RT 8, RW 4. (lur/c3/any)

Jawa Pos

PORPROV



TIDAK LAYAK DIGUNAKAN: Venue panjat tebing yang berada di GOR Delta, Sidoarjo, kemarin.

Minta Jadi Tuan Rumah untuk Pencak Silat, Wushu, dan Sambo

SIDOARJO - Tiga cabang olahraga (cabor) dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VIII di Sidoarjo September mendatang diusulkan digelar di Sidoarjo. Yakni, pencak silat, wushu, dan sambo. Cabor tersebut rencananya ditukar dengan cabor *handball*, panjat tebing, dan *bridge*.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo Djoko Supriyadi mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim agar tiga cabor tersebut digelar di Sidoarjo pada porprov mendatang. Usulan itu menyusul salah satu *venue*, yakni panjat tebing, di Gelora Delta Sidoarjo tidak layak digunakan untuk pertandingan dalam porprov. "Sehingga kami usulkan cabor lainnya agar digelar di Sidoarjo," katanya.

Rencana awal, cabor pencak silat bakal digelar di Jombang, wushu di Kota Mojokerto, dan sambo di Kabupaten Mojokerto. Alasannya, tempat cabor-cabor tersebut sudah sangat siap dan banyak nomor pertandingan yang digelar pada cabor itu. Artinya, akan banyak suporter yang datang.

Namun, Djoko menyebut pihaknya sebatas mengusulkan. Keputusannya tetap berada di tangan KONI Jatim. Termasuk solusi terkait lokasi panjat tebing nanti. Sebab, *venue* di Sidoarjo tidak standar jika digunakan untuk kompetisi. "Kami belum mendapatkan jawaban bagaimana nantinya. Kami masih menunggu dari KONI Jatim," katanya. (uzi/c6/any)

Jawa Pos

91 Bacaleg dari 9 Parpol Tidak Memenuhi Syarat

Dipertimbangkan oleh Panitia Pengawasan dan Verifikasi Dokumen Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo

KPU Kembali Beri Waktu Perbaikan

SIDOARJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo tuntas memverifikasi 804 berkas bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang sebelumnya melakukan perbaikan persyaratan pencalonan. Hasilnya, ada 91 bacaleg yang tidak memenuhi syarat (TMS), mereka berasal dari sembilan partai politik.

Sebelumnya, KPU Sidoarjo memverifikasi persyaratan dokumen 817 bacaleg yang mendaftar. Hasilnya, ada 804 bacaleg dari 18 partai politik (parpol) yang harus kembali melakukan perbaikan. Kemarin (6/8) setelah verifikasi lanjutan, KPU Sidoarjo kembali mengumumkan ada 91 bacaleg yang TMS. "Sebanyak 91 bacaleg itu berasal dari 9 parpol," terang Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak kemarin.

Meski sudah diverifikasi, Iskak mengatakan bahwa pihaknya kini

kembali memberikan waktu untuk perbaikan persyaratan. Pemberian waktu tambahan itu sesuai dengan keputusan KPU RI yang disampaikan ke KPU daerah. "Ada tambahan waktu perbaikan sesuai surat dari KPU Pusat. Mereka diberi waktu sampai 11 Agustus nanti untuk perbaikan," kata Iskak. Artinya, masih ada kemungkinan 91 bacaleg tersebut bisa bersaing pada Pemilihan Umum Legislatif 2024. Iskak menyatakan, beberapa berkas yang dinyatakan TMS antara lain

karena ada dokumen yang tidak lengkap. Misalnya, belum surat legalisir ijazah, surat ke rumah dan lainnya. Iskak menyinggung mekanisme perbaikan sebelumnya. Yakni, dilakukan parpol yang mendaftarkan. Setelah itu, pihaknya akan melakukan verifikasi. Proses berlangsung hingga masa pendaftaran calon sementara (18 Agustus mendatang). "18 Agustus diumumkan hasilnya," ungkapnya. (uzi/c6/any)

Jawa Pos

Perubahan Ujian SIM Serentak di 468 Satpas

Mulai Hari Ini Resmi Tak Ada Lagi Layout Angka 8 dan Trek Zig-zag

JAKARTA—Anasdotrong masyarakat dan perintah Kapoltjenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengubah beberapa hal dalam pelaksanaan ujian pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Khususnya pada bagian ujian teori dan ujian praktik untuk pembuatan SIM C.

YANG BARU DALAM UJIAN SIM

UJIAN TEORI	UJIAN PRAKTIK
Korlantas Polri membuat buku panduan yang bisa diakses masyarakat sebelum mengajukan pembuatan SIM. Buku itu berisi soal-soal yang nanti muncul dalam ujian. Juga digunakan animasi dalam soal-soal.	Perubahan paling jelas dalam ujian praktik untuk pembuatan SIM C atau SIM sepeda motor. Korlantas merubah layout ujian praktik SIM C. Tidak ada lagi angka 8 dan praktik zig-zag.
Tidak ada lagi pembayaran tunai untuk pembuatan SIM. Selanjutnya melalui bank, termasuk perpanjangan SIM dan STNK. Perpanjangan SIM bisa lewat aplikasi Sinat, sedangkan perpanjangan STNK lewat aplikasi Signal.	Korlantas Polri juga memberikan keleluasaan kepada masyarakat yang tidak lulus ujian pembuatan SIM untuk mengulang. Ujian akan tersebut bisa dilakukan dua kali tanpa dikenakan biaya tambahan.



LINTASAN BARU: Anggota Satlantas Alpa Oky Mianto mempersiapkan jalur lintasan baru praktik sepeda motor di halaman Satpas Colombo, Surabaya, kemarin (6/8).



MENDENGAR MASUKAN: Calon pemohon SIM menjablani uji coba dengan lintasan baru di Satpas Daan Mogot, Jakarta (4/8).

Jawa Pos

Perubahan Ujian SIM Serentak di 468 Satpas

Sambungan dari hal 1

Mulai hari ini (7/8), perubahan ujian SIM tersebut berlaku secara serentak di 468 satuan penyelenggara administrasi SIM (satpas). Jumat (4/8) pekan lalu Korlantas Polri sudah menguji coba perubahan ujian SIM itu di Satpas Daan Mogot. Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi menyampaikan bahwa pihaknya sudah memastikan kesiapan **perubahan tersebut**.

Terutama perubahan pada bagian desain *layout* atau trek ujian praktik SIM C. "Kami menerima banyak masukan dari masyarakat bahwa ujian praktik dengan metode angka 8 dirasa cukup menyulitkan," kata dia.

Dia memastikan *layout* angka 8 dan trek zig-zag yang kerap membuat peserta ujian SIM "resah" sudah tidak ada lagi. Setelah diuji coba akhir pekan lalu, mulai awal pekan ini desain *layout* baru tersebut diaplikasikan di seluruh satpas di Indonesia.

"Jadi, teman-teman yang di daerah, yang di wilayah, bisa melihat langsung di polres masing-masing. Apakah sudah tersedia *layout* seperti ini (desain *layout* baru), terang Firman.

Dari Semarang, Direktorat

Lalu Lintas Polda Jawa Tengah memastikan seluruh polres jajaran telah mengubah bentuk atau metode praktik ujian SIM C. Polda Jawa Tengah juga telah memberikan kesempatan kepada pemohon SIM untuk mengikuti latihan sebelum pelaksanaan praktik ujian.

"Boleh setiap hari datang untuk latihan. Tidak harus yang datang itu peserta ujian," ungkap Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombespol Agus Suryo Nugroho kepada *Jawa Pos Radar Semarang* kemarin (6/8).

Polres jajaran Polda Jawa Tengah sudah siap untuk pelaksanaan praktik SIM C dengan model baru mulai Senin (7/8) ini. Model lintasan praktik yang berbentuk huruf S dan ukuran juga diperlebar dari ukuran lama 1,5 meter menjadi 2,5 meter kali lebar kendaraan.

Selanjutnya, untuk uji pengereman, panjang lintasan menjadi 20 meter dan jarak antarpatok menjadi 2,5 meter. Pada uji *U-turn*, dilewati lintasan sepanjang 10 meter dengan lebar tikungan belok 2 meter dan jarak antarpatok menjadi 3 meter.

"Diharapkan pemohon SIM itu hari Senin (hari ini) selanjutnya di Jawa Tengah sudah siap dengan ujian

praktik model baru," katanya.

Di Surabaya, peniadaan pola lintasan ujian praktik SIM berbentuk angka 8 dan zig-zag berdampak pada kelulusan pemohon. Lintasan baru berpola huruf S lebih mempermudah peserta ujian.

Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman menyatakan, dampak perubahan lintasan itu terlihat sejak dijajal kali pertama Jumat (4/8). Dari 14 peserta uji coba, semuanya lulus.

"Mereka sebelumnya sudah pernah tes dan gagal. Bahkan ada yang sudah dua kali. Waktu mengulang dengan lintasan pola baru langsung lulus," katanya kemarin.

Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menambahkan, perubahan pola lintasan itu juga diterapkan di semua polres jajaran. Sebab, instruksi perubahan datang dari pusat. "Jajaran polda tentu menyesuaikan," ungkapnya.

Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, juga sudah siap memulai operasional lintasan uji SIM terbaru hari ini. Lintasan selebar 2 meter telah rampung dibuat di area berukuran 35 x 30 meter. Tidak ada lagi lintasan zig-zag dan angka 8.

Bagian tepi lintasan diberi penanda tiang besi pendel. Di sepanjang lajur juga diberikan petunjuk menggunakan tanda panah. Termasuk tandem berwarna kuning menjangal percabangan sebagai pengingat bagi pengendara. Sejak Jumat (4/8) lalu, lintasan itu terus diuji coba.

Prosedur ujian praktik itu masih sama dengan sebelumnya. Yakni, harus lulus ujian teori dulu. Sebelum ujian teori, pemohon bisa mempelajari kisi-kisinya dengan membaca buku panduan latihan uji SIM yang *e-book*-nya dapat diunduh secara gratis.

"Minimal baca 526 soal cini (*e-book*), empat bagian tapi yang diujikan hanya 6 soal dalam empat bagian. Jadi, *random* kalau ujian tapi isinya sama," teran Dirregident Korlantas Pol Brigjen Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi.

Lewat desain *layout* baru tersebut, Korlantas Polri menguji kemampuan peserta ujian SIM. Mulai kemampuan memahami aturan sampai kemampuan mengemudikan kendaraan. Selain itu, Korlantas Polri memastikan para peserta ujian SIM selalu menutamakan keselamatan saat berkendara. (*syn/edi/donmha/ton/dre/pri/dan/c19/tt*)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

√ Perubahan Ujian SIM Serentak di 468 Satpas

Sambungan dari hal 1

Mulai hari ini (7/8), perubahan ujian SIM tersebut berlaku secara serentak di 468 satuan penyelenggara administrasi SIM (satpas). Jumat (4/8) pekan lalu Korlantas Polri sudah menguji coba perubahan ujian SIM itu di Satpas Daan Mogot. Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi menyampaikan bahwa pihaknya sudah memastikan kesiapan **perubahan tersebut**.

Terutama perubahan pada bagian desain *layout* atau trek ujian praktik SIM C. "Kami menerima banyak masukan dari masyarakat bahwa ujian praktik dengan metode angka 8 dirasa cukup menyulitkan," kata dia.

Dia memastikan *layout* angka 8 dan trek zig-zag yang kerap membuat peserta ujian SIM "resah" sudah tidak ada lagi. Setelah diuji coba akhir pekan lalu, mulai awal pekan ini desain *layout* baru tersebut diaplikasikan di seluruh satpas di Indonesia.

"Jadi, teman-teman yang di daerah, yang di wilayah, bisa melihat langsung di polres masing-masing. Apakah sudah tersedia *layout* seperti ini (desain *layout* baru), terang Firman.

Dari Semarang, Direktorat

Lalu Lintas Polda Jawa Tengah memastikan seluruh polres jajaran telah mengubah bentuk atau metode praktik ujian SIM C. Polda Jawa Tengah juga telah memberikan kesempatan kepada pemohon SIM untuk mengikuti latihan sebelum pelaksanaan praktik ujian.

"Boleh setiap hari datang untuk latihan. Tidak harus yang datang itu peserta ujian," ungkap Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombespol Agus Suryo Nugroho kepada *Jawa Pos Radar Semarang* kemarin (6/8).

Polres jajaran Polda Jawa Tengah sudah siap untuk pelaksanaan praktik SIM C dengan model baru mulai Senin (7/8) ini. Model lintasan praktik yang membentukkan huruf S dan ukuran juga diperlebar dari ukuran lama 1,5 meter menjadi 2,5 meter kali lebar kendaraan.

Selanjutnya, untuk uji pengereman, panjang lintasan menjadi 20 meter dan jarak antarpatok menjadi 2,5 meter. Pada uji *U-turn*, dilewati lintasan sepanjang 10 meter dengan lebar tikungan belok 2 meter dan jarak antarpatok menjadi 3 meter.

"Diharapkan pemohon SIM itu hari Senin (hari ini) seluruhnya di Jawa Tengah sudah siap dengan ujian

praktik model baru," katanya.

Di Surabaya, peniadaan pola lintasan ujian praktik SIM berbentuk angka 8 dan zig-zag berdampak pada kelulusan pemohon. Lintasan baru berpola huruf S lebih mempermudah peserta ujian.

Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman menyatakan, dampak perubahan lintasan itu terlihat sejak dijajal kali pertama Jumat (4/8). Dari 14 peserta uji coba, semuanya lulus.

"Mereka sebelumnya sudah pernah tes dan gagal. Bahkan ada yang sudah dua kali. Waktu mengulang dengan lintasan pola baru langsung lulus," katanya kemarin.

Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menambahkan, perubahan pola lintasan itu juga diterapkan di semua polres jajaran. Sebab, instruksi perubahan datang dari pusat. "Jajaran polda tentu menyesuaikan," ungkapnya.

Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, juga sudah siap memulai operasional lintasan uji SIM terbaru hari ini. Lintasan selebar 2 meter telah rampung dibuat di area berukuran 35 x 30 meter. Tidak ada lagi lintasan zig-zag dan angka 8.

Bagian tepi lintasan diberi penanda tiang besi pendek. Di sepanjang lajur juga diberikan petunjuk menggunakan tanda panah. Termasuk tanda rem berwarna kuning menjelang percabangan sebagai pengingat bagi pengendara. Sejak Jumat (4/8) lalu, lintasan itu terus diuji coba.

Prosedur ujian praktik itu masih sama dengan sebelumnya. Yakni, harus lulus ujian teori dulu. Sebelum ujian teori, pemohon bisa mempelajari kisi-kisinya dengan membaca buku panduan latihan uji SIM yang *e-book*-nya dapat diunduh secara gratis.

"Minimal baca 526 soal di sini (*e-book*), empat bagian, tapi yang diujikan hanya 65 soal dalam empat bagian. Jadi, *random* kalau ujian, tapi isinya sama," terang Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi.

Lewat desain *layout* baru tersebut, Korlantas Polri menguji kemampuan peserta ujian SIM. Mulai kemampuan memahami aturan sampai kemampuan mengemudikan kendaraan. Selain itu, Korlantas Polri memastikan para peserta ujian SIM selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. (syn/edi/dom/mha/ton/dre/pri/dan/c19/ttg)

DUTA

Masa Pengabdian 40 Tahun Gus Muhdlor Serahkan Insentif 951 Nakes dan Kader Posyandu

Sidoarjo, Memo X

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali kembali membagikan insentif kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) dan kader kesehatan. Kali ini, insentif diberikan kepada mereka yang berada di Kecamatan Gedangan.

Terdapat 951 orang tenaga kesehatan dan kader kesehatan di Kecamatan Gedangan yang memperoleh insentif itu. Insentif ini diserahkan Bupati Sidoarjo di GOR Gedangan. Ikut hadir dalam penyerahan itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr Feny Apridawati, Camat Gedangan Inneke Dwi Setyawati serta Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Gus Muhdlor mengapresiasi kerja keras seluruh tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam memberi pelayanan kesehatan selama ini. Penghargaan setinggi-tingginya itu diberikan atas dedikasi melayani masyarakat patut diberikan. Baginya pengabdian mereka kepada masyarakat tidak sebentar.

Ada yang sudah 40 tahun lamanya menjadi kader Posyandu. Jumlah kader seperti ini juga tidak sedikit. Di Kecamatan Gedangan ada 40 orang. Mereka merupakan angka yang sangat berarti dengan pengabdian selama 40 tahun seperti ini," ujar



INSENTIF - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali kembali membagikan insentif kepada 951 Tenaga Kesehatan (Nakes) dan kader kesehatan di GOR Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jumat (04/08/2023).

Gus Muhdlor kepada Memo X, Jumat (04/08/2023).

Selain itu, Gus Muhdlor menjelaskan pemberian insentif ini bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo. Dirinya meminta tidak melihat nilai nominalnya. Namun dilihat sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada mereka yang mengabdikan diri di bidang kesehatan. Selain itu, Pemkab Sidoarjo berencana memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan gratis kepada seluruh kader kesehatan.

"Yang harus dilihat hari semangat perhatian kami kepada ibu-ibu semua. Saya juga menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan mulai Tahun 2024 semua kader kesehatan ke Sidoarjo harus dilengkapi BPJS

Ketenagakerjaan," pinta Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Gus Muhdlor juga menyampaikan Kabupaten Sidoarjo saat ini memiliki tugas yang amat berat. Kompleksitas masalah tidak dapat dihindari sebagai kabupaten penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur. Menurunnya, hal ini sangat wajar sebagai kabupaten dengan pertumbuhan yang pesat. Industrialisasi yang semakin masif dan jumlah penduduk yang semakin banyak.

"Bahkan sekarang akan seiring dengan bertambahnya polusi. Karena itu, kami berharap semua kader harus mulai bergerak untuk menurunkan angka stunting. Termasuk, AKI dan AKB serta penting lagi konsistensi un-

tuk memastikan IPM di Sidoarjo yang salah satu tolak ukurnya adalah bidang kesehatan harus berubah jauh lebih baik dari hari ini," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Gus Muhdlor juga berharap sinergi semua pihak untuk menuntaskan permasalahan kesehatan. Derap langkah pembangunan kesehatan diminta juga selangkah. Dengan begitu dirinya yakin tujuan kesejahteraan dan menyahtakan generasi emas menuju Indonesia Emas 2024 lebih mudah.

"Kalau kemudian Bupati, Kepala Dinas, Camat, Kades, DPRD, RT/RW dan semua kader kesehatan mau turun. Bahkan derap langkahnya sama, saya yakin yang menjadi tujuan kita untuk menyahtakan generasi emas kita menuju Indonesia emas 2024 pasti akan lebih mudah lagi," kata putra KH Agoes Ali Masyhuri ini.

Sementara Gus Muhdlor berpesan kader Posyandu berusia lanjut untuk tetap semangat dalam mengabdikan. Meski nanti dihadapkan pada pelayanan yang serba digital. Di era itu, semua kader dimintanya tidak menjadi halangan kader kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (par/wan)

MEMO X

Ekspor Perdana 15 Ton Rumput Laut Sidoarjo Tembus Pasar Australia

Sidoarjo, Memo X

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri acara pengiriman perdana rumput laut gracilaria sebanyak 15 ton atau setara dengan Rp 150 juta dari Koperasi Agar Makmur Sentosa ke Uluu Australia, Jumat (04/08/2023). Selain pelepasan ekspor rumput laut, acara ini juga sekaligus peluncuran program hilirisasi industri rumput laut di Indonesia.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali merasa bangga akan potensi rumput laut Sidoarjo yang dikelola Koperasi Agar Makmur Sentosa yang terletak di Dusun Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo.

"Saya bangga akan potensi yang dimiliki salah satu koperasi di Sidoarjo yang mampu mengekspor hingga ke Australia ini. Semoga ini bisa menjadi contoh yang baik untuk desa lain dengan potensi yang ada pada masing-masing daerah," ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini ke-

pada Memo X, Jumat (04/08/2023).

Gus Muhdlor yang juga alumni Fisip Unair Surabaya ini menekankan pentingnya pengembangan sektor kelautan dan program hilirisasi. Hal itu untuk meningkatkan nilai tambah produk rumput laut dari proses produksi hingga pemasaran.

"Program hilirisasi ini nantinya diharapkan akan meningkatkan nilai produk dengan kualitas baik. Sehingga akan dapat meningkatkan nilai ekspor tidak hanya di satu negara saja, tetapi bisa menembus ekspor ke beberapa negara lain," kata Gus Muhdlor.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya yang telah dilakukan Bupati masyarakat Sidoarjo dalam mengembangkan industri rumput laut itu. "Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo. Upaya ini juga sejalan dengan program hilirisasi ekonomi pembangunan berkelanjutan dan penurunan resiko lingkungan dan blue economy (pembana-



EKSPOR - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mendampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memberangkatkan ekspor 15 ton rumput laut perdana ke Australia, Jumat (04/08/2023).

ngunan ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan). Nanti semoga ini menjadi referensi bagi daerah lain di luar Sidoarjo," kata Khofifah Indar Parawansa.

Selain itu, Khofifah juga

menambahkan program hilirisasi industri rumput laut di Sidoarjo diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani

rumpum laut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. "Nanti pabriknya akan kami bangun di Sidoarjo agar secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan warga yang sama-

kin substantif," p... Sementara berd... Dirjen Kementerian... Perikanan tamba... di Indonesia terc... 247.803 hektar. Da... itu, 70 persen mer... utara Jawa. Jika l... dikembangkan te... serta kepingin, mal... tahunnya akan r... hasiikan sebanya... Jika dihitung dal... akan menghasilkan... untuk 1 hektar ta... Sedangkan bi... mampu menyele... ga 3 hektar. Den... hektar untuk kor... laut mampu men... juta setahun. Ke... komoditas band... bisa mencapai 2 k... gan nilai tiap kal... juta untuk pertah... Terakhir untuk ko... setiap tahun bisa r... panen dengan nil... sebesar 5 juta jika... juta. (par/wan)

MEMO X



PEMBELI MENURUN: Cabai dijual di Pasar Sukodono.

Harga Cabai Mulai Naik di Pasar Sukodono

SUKODONO - Awal Agustus harga cabai dan tomat di pasar mulai merangkak naik. Harganya naik hampir dari setengahnya. Berdasarkan informasi pedagang di Pasar Sukodono, harga cabai kecil sebelumnya Rp 22 ribu per kg. Namun, saat ini naik menjadi Rp 35 ribu per kg. Sedangkan harga jenis cabai besar naik hampir 50 persen atau Rp 35 ribu per kg dari yang sebelumnya kisaran Rp 18 ribu per kg. Sementara itu, untuk harga tomat saat ini harganya Rp 10 ribu per kg. Dari yang sebelumnya Rp 8 ribu per kg.

Salah satu pedagang, Amik mengatakan, naiknya harga cabai dan tomat dikarenakan banyaknya permintaan pembeli di tengah suplai yang menurun. "Harganya naik karena biasanya waktunya

telat (sedikit pemasok, red), harga murah sewaktu banjir sayuran (banyak pemasok, red)," katanya, Minggu (6/8).

Amik mengaku hanya mendapatkan keuntungan yang minim. Karena memang banyaknya persaingan di antara pedagang.

Begitu juga dengan Suabdi, pedagang sayur cabai dan tomat. Menurutnya kenaikan kedua bahan pokok tersebut karena pada bulan ini akan ada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. "Naiknya, mungkin bisa jadi menjelang tujuh belasan (17 Agustus, red)," ucapnya.

Naiknya harga tersebut berpengaruh terhadap jumlah pembeli. Di pasar. Dia mengharapkan kenaikan harga pasar dapat ditekan. Agar pembeli kembali ramai datang ke pasar. (sai/vga)

Jawa Pos

Sukseskan Pemilu 2024, Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

KOTA-Guna menyukseskan pemilu 2024 baik mulai tahapan sosialisasi, hingga pelaksanaan pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang, KPU RI menggelar, sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu 2024 di Hotel Aston Sidoarjo, Minggu (6/8). Sebagai narasumber yakni, anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin, Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jatim Nurul Amalia dan Fauzan Adim dari Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jatim Nurul Amalia berharap masyarakat bersedia secara aktif terlibat dalam setiap tahapan Pemilu. "Kami harap informasi yang diperoleh tidak hanya berhenti dalam forum ini, tapi melalui bapak ibu sekalian dapat menularkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya seperti aktif mengedukasi nama di rumah dan DPT baik melalui petugas PPC maupun lewat online," terangnya.

Sementara itu, anggota DPR RI

Komisi II Rahmat Muhajirin menekankan, fungsi Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dan integrasi bangsa. Pemilih sebagai warga negara mempunyai kedaulatan dalam membentuk dan menentukan pemerintah lima tahun ke depan. Karenanya, Rahmat mengajak pemilih untuk turut menentukan pemimpinnya.

"Pemilih cerdas adalah pemilih yang terlibat dan mempunyai kesadaran pada saat sebelum pemilu (pre-election), saat pemilu berlangsung (election), dan setelah pemilu dilaksanakan (post-election)," jelas Rahmat Muhajirin dari Fraksi Partai Gerindra dapil Surabaya-Sidoarjo itu.

Pemilih cerdas saat sebelum pemungutan suara dilaksanakan harus memastikan terdaftar sebagai pemilih. Ia juga mengetahui kapan pemungutan suara dilaksanakan. Mengetahui siapa saja pasangan calon atau calon yang berkontestasi berikut rekam jejaknya. Serta mengetahui tata cara menggunakan hak suara dengan benar.



DAPAT ILMU: Narasumber anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin (tengah), Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jatim Nurul Amalia (dua dari kanan) dan Fauzan Adim dari Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas (dua dari kiri).

Sedangkan saat pemungutan suara, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tepat waktu. Sudah memiliki pilihan terhadap pasangan calon/calon berdasarkan pertimbangan yang rasional dan logis. Bisa meng-

gunakan hak suaranya dengan benar. Setelah pemungutan suara usai dilaksanakan, Pemilih yang cerdas turut serta mengawasi pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara. (vga)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

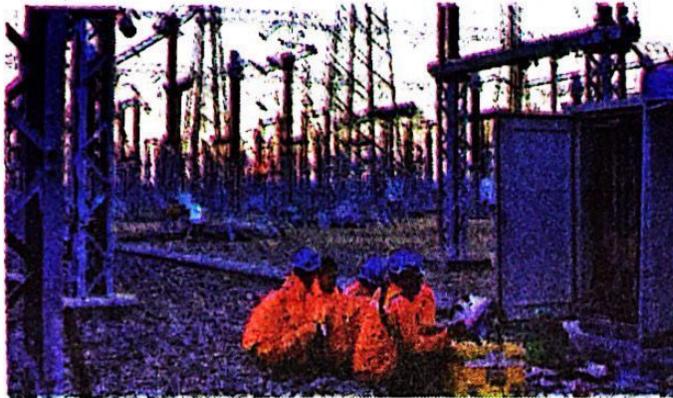
PLN Energize IBT 2 GITET 500 kV Krian untuk Perkuatan Interkoneksi Jawa-Bali

KRIAN—Strategi penguatan keandalan sistem kelistrikan interkoneksi Jawa-Bali berhasil dilakukan PLN Unit Induk Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) pada pekerjaan penggantian Interbus Transformer (IBT) 2 Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Krian.

Pekerjaan dilakukan sebagai komitmen PLN dalam memastikan peralatan berfungsi optimal dalam mengantisipasi potensi munculnya gangguan pada sistem kelistrikan. Mengingat IBT 2 telah beroperasi sejak 1997, sehingga dalam perencanaannya, pekerjaan ini telah melalui kajian dan perhitungan sistematis.

General Manager PLN UIT JBM, Didik Fauzi Dakhlan mengatakan pekerjaan berhasil diselesaikan jauh lebih cepat dari target yang diperkirakan.

"Penggantian IBT 2 GITET 500 kV Krian perlu dilakukan sebagai komitmen menghadirkan keandalan sistem interkoneksi Jawa-Bali. Saat asesmen ditemui adanya performa yang me-



IST

nurun pada IBT 2 karena usia operasionalnya yang sudah cukup lama. Semoga dengan kembali beroperasinya IBT 2 yang baru ini, performa sistem semakin andal dan pelayanan listrik untuk pelanggan terjaga aman," papar Didik.

Pekerjaan penggantian IBT 2 GITET 500 kV Krian dengan pemberian tegangan (energize) berhasil dilakukan pada Rabu (2/8) pukul 22:33 WIB. Lebih cepat dari rencana yang awalnya selesai pada tanggal 7 Agustus 2023.

"PLN berhasil menghemat konsumsi BBM untuk peker-

jaan ini. Jika dikalkulasi biaya operasional pekerjaan 1 hari sebesar Rp3 miliar, maka kami dapat berhemat sejumlah kurang lebih Rp15 miliar karena kami lebih cepat 5 hari dari target awal," ungkap Didik.

Lebih lanjut Didik juga menyebutkan dengan beroperasinya kembali IBT 2 GITET 500 kV Krian yang merupakan salah satu trafo step down yang menyuplai listrik ke wilayah Gresik, Surabaya, Mojokerto, dan Jombang, PLN memastikan performa peralatan dapat kembali berfungsi optimal dalam sistem kelistrikan. (*)

KOMITMEN:
Tim PLN saat berhasil mengerjakan penggantian IBT 2 GITET 500 kV, Rabu (2/8).



Warga Tambakoso Pertanyakan Legalitas Event Black Stone Drag Race

Sidoarjo, Memorandum

Warga Tambakoso, Waru mempertanyakan legalitas event Black Stone Drag Race yang digelar di desanya. Buntutnya terjadi demo perihal masalah itu.

Warga mendatangi event organizer Black Stone. Mediasi antara pihak event organizer yang diwakili Boy pun dilakukan.

Dalam mediasi itu, Boy mengatakan akan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak event Black Stone Drag Race, Sabtu (5/8).

Sementara itu, Muhammad Fauzi, Kepala Desa (Kades) Tambakoso mengatakan warganya minta penjelasan legalitas Black Stone Drag Race ini. Boy pun mengatakan bahwa kegiatan ini pun pemerintah yang dilaksanakan di Tambakoso tepatnya di Jalan AMD RT 09 RW 03.

"Saya berharap pihak penyelenggara segera memberikan legalitas yang jelas kepada pihak desa," tutur Fauzi.

Fauzi menambahkan warga menginginkan dilibatkan dalam kegiatan tersebut seperti pendirian stan, parkir, dan keamanan. Semua melibatkan pihak Desa Tambakoso.

Kades menjembatani warga dengan pihak penyelenggara. Jadi itu penyelenggara juga linier dengan bupati, kasdes, kas RT/RW, dan warga yang terdampak akibat event tersebut. (zae/fjk/nov)



Warga Tambakoso, Waru melakukan mediasi dengan penyelenggara Black Stone Drag Race terkait legalitas kegiatan yang diselenggarakan di desanya.



Sejumlah stan dalam kegiatan Black Stone Drag Race di Jalan AMD RT 09 RW 03 Tambakoso, Waru.



BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



SERIOUS: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyampaikan nota penjelasan KUAPPAS Perubahan APBD 2023.

Bahas Perubahan APBD, Ada Peningkatan 1 Persen

KOTA-Kalangan legislatif dan eksekutif mulai membahas Perubahan APBD 2023. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyampaikan nota penjelasan mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan APBD 2023 dalam rapat paripurna.

Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu mengatakan, terdapat perubahan pada beberapa sektor anggaran yang dilakukan secara wajar. "Mengikuti kondisi dan kebutuhan keuangan daerah," katanya.

Anggaran pendapatan mengalami kenaikan dari Rp 4,7 triliun

● Ke Halaman 10

Bahas Perubahan APBD,...

menjadi Rp 4,8 triliun. Atau naik sebesar 1,10 persen. Rinciannya, pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula Rp 1,935 triliun turun menjadi Rp 1,905 triliun. Mengalami penurunan sebesar 1,55 persen.

Sementara pendapatan transfer naik dari Rp 2,823 triliun menjadi Rp 2,905 triliun. Meningkatkan sebesar 2,92 persen. "Serangan pendapatan lain-lain tetap pada angka Rp 4,3 miliar," imbuhnya.

Pada sisi anggaran belanja daerah, terjadi peningkatan dari Rp 5,210 triliun menjadi Rp 5,307 triliun. Naik sebesar 1,87 persen. Terdiri dari belanja operasi yang meningkat dari Rp 3,555 triliun menjadi Rp 3,736 triliun.

Naik sebesar 2,21 persen.

Namun, anggaran belanja modal mengalami penurunan dari Rp 886 miliar menjadi Rp 851 miliar. Turun 4 persen. Biaya Tidak Terduga (BTT) naik dari Rp 16,2 miliar menjadi Rp 20 miliar. Ada peningkatan sebesar 25,63 persen.

Sementara itu, anggaran belanja transfer mengalami kenaikan dari Rp 651 miliar menjadi Rp 699 miliar. Naik sebesar 7,32 persen. Pembiayaan daerah juga mengalami kenaikan dari Rp 447 miliar menjadi Rp 492 miliar, naik sebesar 10,02 persen.

Selanjutnya, Gus Muhdlor agar perubahan anggaran ini segera dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Untuk kemudian dibentuk peraturan daerah. (nis/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Minggu Ini Dana Banpol Cair, Tetap Rp 5 Ribu Per Suara

KOTA-Setelah melewati proses panjang, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait dana bantuan politik (Banpol) untuk tahun ini. Diperkirakan Rabu (9/8) kucuran dana

untuk partai-partai politik di Sidoarjo itu bisa cair.

Dalam SK tersebut, dana hibah banpol untuk partai politik parlemen akan tetap sebesar Rp 5 ribu per suara. Sama dengan anggaran pada 2021. Padahal pada APBD

2023 disetujui kenaikan dana banpol menjadi Rp 10 ribu per suara. "Kenaikan tersebut masih menunggu persetujuan dari Gubernur Jatim," kata Muhdlor.

Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor mengungkap-

kan, Pemkab Sidoarjo telah mengirim surat permohonan persetujuan kenaikan dana Banpol kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Ketua DPD PAN Sidoarjo Emir Firdaus, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih pada partai politik. Karena partai politik merupakan tempat lahirnya pemimpin bangsa.

● Ke Halaman 10

Jawa Pos

Minggu Ini Dana Banpol Cair...

Bahkan KPK juga merekomendasikan kenaikan dana banpol sebagai upaya memperkuat partai politik. "Setuju dinaikkan dengan batas tertentu," katanya.

Pihaknya juga membandingkan

besaran dana banpol yang diterima 9 partai politik dengan hibah yang diberikan kepada organisasi kementerian. Emir berharap adanya kenaikan dana banpol direalisasikan untuk mendukung pembinaan partai politik sebagai tempat mendidik pemimpin.

Jika mengacu kepada dana banpol

2021, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan partai pemenang Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo akan mendapatkan sekitar Rp 1,5 miliar. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang hanya memiliki satu wakil di DPRD Sidoarjo akan memperoleh sekira Rp 145 juta. (nis/vga)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



MINAT BACA: Kepala Dispendikbud Sidoarjo Tirta Adi (dua dari kiri) saat menghadiri peresmian perpustakaan ramah anak di SDN Tebel.

Sebarkan Virus Literasi, Dorong Perpustakaan Ramah Anak

GEDANGAN-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mutiara Rindang terus mendorong sekolah di Sidoarjo untuk melek dalam literasi. Kali ini giliran SDN Tebel di Kecamatan Gedangan yang resmi membuka perpustakaan ramah anak, Jumat (4/8). Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo. Kepala Dispendikbud Sidoarjo Tirta Adi sangat mensupport akan pembukaan perpustakaan ramah

anak. Sebab perpustakaan semacam itu sudah banyak menyasar sekolah tingkat dasar di Sidoarjo.

"Ini merupakan hasil kerja sama dengan LSM Mutiara Rindang. Karena itu, kerja sama ini harus bisa benar membawa manfaat. Kami serius membangun perpustakaan untuk anak-anak Sidoarjo," jelasnya.

Berdirinya perpustakaan membuatnya berharap literasi dan numerasi anak-anak Kota Delta meningkat.

● Ke Halaman 10

Jawa Pos

Sebarkan Virus Literasi...

"Mudah-mudahan nanti pendidikan Sidoarjo juga meningkat dengan bagus," ucapnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Kepala Balai Bahasa Jawa Timur Umi Kulsum. Menurut dia, kolaborasi antara pihak sekolah dengan Dispendikbud serta Mutiara Rindang sangat luar biasa. "F... dari balai bahasa, sangat mendukung kegiatan ini," ujarnya.

Umi mengimbau agar masyarakat, sekolah, lingkungan dan sebagainya untuk dapat bekerjasama dalam membuat kegiatan. Sebab, menurutnya perpustakaan merupakan wahana bagi anak-anak untuk semakin dekat dengan buku. "Ini harus didukung oleh semuanya agar anak-anak tidak hanya bermain gadget, yang pada dasarnya tidak semua layak diakses," pesannya.

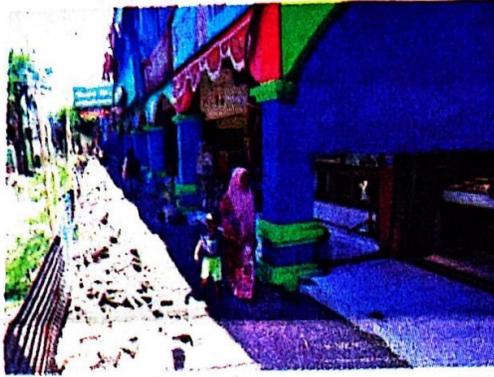
Egitu juga oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

(P3AKB) Nilam Chayandari Listyowati. Baginya, perpustakaan adalah cikal bakal dari sahabat anak. Dimana sahabat tersebut yang nantinya akan memberikan informasi yang sangat luas kepada anak. Dan informasi itu juga sudah sesuai dengan usianya.

Hal tersebut juga adalah bagian dari upaya bagaimana agar anak tidak mudah menelan informasi dari luar yang tidak bertanggungjawab. Dengan pusat informasi itu mereka mempunyai informasi pengetahuan yang sangat luas. (sai/vga)

Jawa Pos

DISPERINDAG



DIKY PUTRA SANSIRI/RADAR SIDOARJO

REVITALISASI: Kondisi depan Pasar Larangan pasca relokasi pedagang pancakan.

Apresiasi Langkah Tegas Penertiban Pasar Larangan

KOTA-Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi atas tindakan tegas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan TNI-Polri yang sukses melakukan relokasi pedagang di Pasar Larangan.

Choirul Hidayat, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo menyatakan bahwa langkah tegas Satpol PP dalam merelokasi pedagang yang berjualan di blok sisi timur Pasar Larangan telah tepat dilakukan. "Apa yang dilakukan petugas Satpol PP ini sudah benar dan patut diapresiasi," ujarnya.

● Ke Halaman 10

Dipindai dengan CamScanner

Apresiasi Langkah...

Selain memberikan apresiasi, politisi DPRD Kabupaten Sidoarjo juga mengapresiasi revitalisasi Pasar Larangan yang terletak di tengah kota. Menurutnya, tempat-tempat yang tidak sesuai untuk berjualan

harus dikembalikan ke fungsi awalnya.

"Sebelum banyak pedagang yang berjualan di luar, Pasar Larangan itu harus dikembalikan fungsinya."

Choirul juga berpendapat bahwa penertiban pasar bukan hanya perlu dilakukan di Pasar Larangan, tetapi

juga di pasar-pasar lain di Sidoarjo. Jika semua pasar tertib dan bersih, maka masyarakat yang berbelanja akan lebih nyaman.

"Kami berharap semua pasar juga dilakukan revitalisasi. Termasuk Pasar Taman yang juga sering dikeluhkan masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Senin (31/7), Satpol PP bersama TNI-Polri telah melakukan penertiban terhadap 130 pedagang yang berjualan di sisi timur Pasar Larangan.

Disperindag Sidoarjo telah menyediakan lapak baru di bagian barat pasar untuk menampung para

pedagang tersebut.

Saat ini, bekas lapak di bagian timur pasar akan untuk pembanguan. Proses normal juga telah dilakukan untuk mendukung pembanguan tersebut. (nis/vga)



MEMBANGGAKAN: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melihat ekspor perdana rumput laut di Jabon ke Australia.

Rumput Laut di Jabon Tembus Pasar Australia, Ekspor Perdana 15 Ton

KOTA-Rumput laut gracilaria sebanyak 15 ton senilai Rp 150 juta dari Koperasi Agar Makmur Sentosa di Jabon di ekspor ke Uluu Australia. Penyerahan produk tersebut disaksikan langsung Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

Jumat (4/8). Selain pelepasan ekspor rumput laut, sekaligus peluncuran program hilirisasi industri rumput laut di Indonesia.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengungkapkan potensi besar industri rumput laut gracilaria oleh Koperasi Agar Makmur Sentosa yang terletak

di Dusun Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon tersebut.

"Saya bangga akan potensi yang dimiliki salah satu koperasi di Sidoarjo yang mampu mengekspor hingga ke Australia, semoga hal ini bisa menjadi contoh yang baik untuk desa lain dengan potensi yang ada pada

masing-masing daerah," ucap Gus Muhdlor sapaan akrabnya.

Dia menekankan pentingnya pengembangan sektor kelautan dan program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah produk rumput laut dari proses produksi hingga pemasaran.

● Ke Halaman 10



Rumput Laut...

"Program hilirisasi ini nantinya diharapkan akan meningkatkan nilai produk dengan kualitas baik. Sehingga akan dapat pula meningkatkan nilai ekspor," ujarnya di tepi perairan saat itu.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Bupati Sidoarjo dan masyarakat

setempat dalam mengembangkan industri rumput laut.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Bupati Sidoarjo dimana upaya ini juga sejalan dengan format membangun green economy (pembangunan berkelanjutan dan penunjang risiko lingkungan) dan blue economy (pelan untuk ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan) nantinya semoga menjadi referensi bagi daerah lain di luar Sidoarjo," jelas Khofifah.

Khofifah menambahkan, program hilirisasi industri rumput laut di Sidoarjo ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani rumput laut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. "Nantinya pabriknya akan kami bangun di Sidoarjo juga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan yang semakin substansif," tambah Khofifah

Dari data Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan tambak tradisional di Indonesia tercatat sebanyak 247.803 hektare. Dari total tersebut 70 persen merupakan pantai utara Jawa. Jika budi daya terus dikembangkan terutama untuk komoditas bandeng, rumput laut, serta kepiting dalam tiap tahunnya akan mampu mengasalkan sebanyak Rp 110 juta. Jika dalam satu bulan akan menghasilkan Rp 9 juta untuk 1 hektare. Sedangkan biasanya petani mampu

menyelesaikan 2 hingga 3 hektare. Dengan rincian 1 hektare untuk komoditas rumput laut mampu menghasilkan Rp 45 juta setahun, sedangkan untuk komoditas bandeng pertahun bisa mencapai 2 kali panen dengan nilai tiap kali panen Rp 25 juta untuk pertahun Rp 50 juta. Dan terakhir untuk komoditas udang tiap tahun bisa mencapai 3 kali panen dengan nilai sekali panen sebesar Rp 5 juta jika setahun Rp 15 juta. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Revisi UU ASN, PPPK Bisa Dapat Jaminan Pensiun

JAKARTA - Pemerintah kembali memberikan angin segar kepada para aparatur sipil negara (ASN) dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Setelah jaminan kenaikan gaji berjenjang, kini ada sinyal untuk memberikan jaminan pensiun.

Sebagai informasi, munculnya status PPPK pada 2019 lalu sempat menjadi polemik. Salah satunya terkait jaminan pensiun. Meski dinyatakan ASN, PPPK tak dapat uang pensiun layaknya pegawai negeri sipil (PNS). Saat itu, skema PPPK pun menuai penolakan keras.

Nah, dalam uji publik revisi UU Nomor 5/2014 tentang ASN, muncul bahasan mengenai

kesejahteraan PPPK. Dalam RUU ASN, kesejahteraan PNS dan PPPK akan digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. PPPK diberi jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema *defined contribution*.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni menyebutkan, perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan ASN itu dilakukan secara menyeluruh. Amanatnya juga dipersiapkan untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran.

Alex mengatakan, revisi UU

5/2014 merupakan jawaban atas dinamika perubahan global yang memengaruhi manajemen sumber daya manusia aparatur. Secara garis besar, terdapat tujuh kluster pembahasan dalam RUU ASN. Meliputi penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN, kesejahteraan ASN, penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Di revisi UU ASN nanti, salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman," katanya. (mia/c6/fal)

Jawa Pos



Arahan Kemen-PAN-RB untuk Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah:

- Tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga Non ASN yang terdaftar dalam basis data BKN
- Pembiayaan tenaga non-ASN tidak mengurangi pendapatan selama ini
- PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK

Sumber: SE Kemen-PAN RB 25 Juli 2023

(Grafis: Rihad Humala/Ketik.co.id)

Nasib Pegawai Honorer Sidoarjo Aman, Rekrutmen CASN Mulai September

Politik & Pemerintahan



Jurnalis: Fathur Roziq | Editor: M. Rifat

Sabtu, 5 Agustus 2023 08:40

KETIK, SIDOARJO – Nasib ribuan tenaga honorer tetap aman. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) tidak menghapus status pegawai honorer. *Deadline* penghapusan pegawai honorer 28 November belum akan diberlakukan. Yang dilarang tegas ialah rekrutmen pegawai honorer baru. Baik non-PNS maupun Non PPPK.

Kebijakan tersebut telah ditegaskan dalam Surat Edaran Kemen-PAN RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tertanggal 25 Juli 2023. Kemen-PAN RB menyampaikan pengarahan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari seluruh Indonesia Kamis (3/8/2023).

Dari Kabupaten Sidoarjo, hadir Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo A. Dhamroni Chudlori, Plt Sekda Andjar Surjadianto, anggota Komisi A Warih Andono, dan Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Farida Puspitasari.

Ketua Komisi A Dhamroni Chudlori menyatakan, pertemuan di Kemen-PAN RB tidak membahas lagi tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 yang menyebut tentang penghapusan tenaga non-ASN atau honorer pada 28 November 2023.

"Yang berstatus honorer tetap honorer. Yang PPPK juga tetap PPPK," katanya di Sidoarjo Jumat (4/8/2023).

Larangan tegas dalam SE Kemen-PAN RB tersebut adalah larangan untuk PPK dan pejabat lain untuk mengangkat pegawai non-ASN dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya.

"Jadi, tidak ada *deadline* 28 November 2023 itu. Posisinya tetap seperti sekarang," ujarnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

JUMLAH PEGAWAI HONORER SEBAGIAN INSTANSI

DI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Instansi	Jumlah Honorer
DLHK	711 orang
UPT SD	2.410 orang
UPT SMP	830 orang
Puskesmas	433 orang
RSUD Sidoarjo	1.057 orang
RSUD Sidoarjo Barat	133 orang
Satpol PP	242 orang
Dishub	300 orang

 Keterangan: |
dari berbagai |
sumber

(Grafis: Rihad Humala/Ketik.co.id)

Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Farida Puspitasari mengatakan, terkait nasib tenaga honorer, untuk sementara, BKD masih mengacu pada SE terakhir Men-PAN RB.

Baca Juga:

[Soal Nasib Tenaga Honorer Sidoarjo, Bupati Muhdlor Patuhi Pemerintah Pusat](#)

Dari pertemuan di Jakarta Kamis lalu, BKD Sidoarjo juga memperoleh formasi untuk rekrutmen PPPK mendatang. Untuk formasi rekrutmen CPNS adanya di lembaga pusat. Untuk daerah, yang ada rekrutmen PPPK.

Ditanya tentang formasi rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) mendatang, Puspitasari mengatakan dirinya akan melapor dulu ke pimpinan di BKD Sidoarjo. Formasi itu akan diumumkan setelah ditandatangani ketua panitia seleksi daerah.

"Mohon ditunggu. Segera kami *upload* di website BKD," ungkapnya di Sidoarjo pada Jumat (4/8/2023).

Sementara itu, dalam laman resminya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023. Untuk formasi di 72 instansi pemerintah pusat, dibutuhkan 78.862 ASN. Untuk formasi pemerintah daerah, dialokasikan 493.634 ASN.

Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat masing-masing terperinci 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK tenaga teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bupati Ahmad Muhdlor (tengah) bersama Ketua DPRD Sidoarjo H Usman MKes, Wakil Ketua DPRD Bambang Riyoko berbincang-bincang dengan hadirin rapat paripurna DPRD Sidoarjo Sabtu (5/8/2023). (Foto: Sekretariat DPRD Sidoarjo)

Soal Nasib Tenaga Honorer Sidoarjo, Bupati Muhdlor Patuhi Pemerintah Pusat

Daerah



Jurnalis: Fathur Roziq | Editor: Mustopa

Sabtu, 5 Agustus 2023 23:25

KETIK, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyatakan akan mengikuti setiap petunjuk, kebijakan, dan langkah pemerintah pusat terkait nasib pegawai honorer. Petunjuk teknis (juknis) maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Jakarta akan dipatuhi.

"Kabupaten Sidoarjo akan berbuat sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat," kata Gus Muhdlor, sapaan Bupati Muhdlor, setelah mengikuti rapat paripurna di DPRD Sidoarjo pada Sabtu (5/8/2023).

Begitu pula terkait penataan ribuan tenaga harian lepas (THL) yang juga belum jelas keputusannya. Pemerintah pusat belum memastikan. Apakah para THL itu akan naik status atau pemerintah pusat justru membuka peluang lewat rekrutmen CPNS baru.

Kabupaten Sidoarjo, lanjut Gus Muhdlor, akan mengikuti prosedur yang diputuskan pemerintah pusat. Sebab, hingga saat ini, belum ada keputusan final soal nasib para tenaga honorer ini. Semuanya masih dalam proses diskusi.

"Jadi, harus ditunggu sampai final dulu," ungkapnya.

Yang pasti, tegas Gus Muhdlor, Kabupaten Sidoarjo akan patuh pada segala keputusan dari pemerintah pusat. Baik aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maupun Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya diberitakan *Ketik.co.id* bahwa nasib ribuan tenaga honorer masih aman. Kemen-PAN RB belum akan menghapus status pegawai honorer. *Deadline* penghapusan pegawai honorer 28 November belum akan diberlakukan. Yang dilarang tegas ialah rekrutmen pegawai honorer baru, baik non-PNS maupun Non-PPPK.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Arahan Kemen-PAN-RB untuk Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah:

- Tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga Non ASN yang terdaftar dalam basis data BKN
- Pembiayaan tenaga non-ASN tidak mengurangi pendapatan selama ini
- PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK

Sumber: SE Kemen-PAN RB 25 Juli 2023

Arahan Kemen-PAN-RB untuk Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah (Ilustrasi: Rihad Humala)

Kebijakan tersebut telah ditegaskan dalam Surat Edaran Kemen-PAN RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tertanggal 25 Juli 2023. Kemen-PAN RB menyampaikan pengarahan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari seluruh Indonesia Kamis (3/8/2023) lalu.

Baca Juga:

[Bantuan Parpol Sidoarjo Cair Separuh, Partai Politik Kecwa](#)

Dari Kabupaten Sidoarjo, hadir Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo A. Dhamroni Chudlori, Plt Sekda Andjar Surjadianto, anggota Komisi A Warih Andono, dan Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Farida Puspitasari.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menyatakan, pertemuan di Kemen-PAN RB tidak membahas lagi tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 yang menyebut tentang penghapusan tenaga non-ASN atau honorer pada 28 November 2023.

"Yang berstatus honorer tetap honorer. Yang PPPK juga tetap PPPK," katanya Jumat (4/8/2023).

Larangan tegas dalam SE Kemen-PAN RB tersebut adalah larangan untuk PPK dan pejabat lain untuk mengangkat pegawai non-ASN dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya.

"Jadi, tidak ada *deadline* 28 November 2023 itu. Posisinya tetap seperti sekarang," ujarnya.

Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Farida Puspitasari mengatakan, terkait nasib tenaga honorer, untuk sementara, BKD Sidoarjo masih mengacu pada SE terakhir Men-PAN RB.

Dari pertemuan di Jakarta Kamis lalu, BKD juga memperoleh formasi untuk rekrutmen PPPK mendatang. Untuk formasi rekrutmen CPNS adanya di lembaga pusat. Untuk daerah, yang ada rekrutmen PPPK.

Ditanya tentang formasi rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) mendatang, Puspitasari mengatakan dirinya akan melapor dulu ke pimpinan di BKD Sidoarjo. Formasi itu akan diumumkan setelah ditandatangani ketua panitia seleksi daerah.

Baca Juga:

[Nasib Pegawai Honorer Sidoarjo Aman, Rekrutmen CASN Mulai September](#)

"Mohon ditunggu. Segera kami *upload* di website BKD," ungkapnya pada Jumat (4/8/2023).

Sementara itu, dalam laman resminya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023. Untuk formasi di 72 instansi pemerintah pusat, dibutuhkan 78.862 ASN. Untuk formasi pemerintah daerah, dialokasikan 493.634 ASN.

Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat masing-masing terperinci 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK tenaga teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



(Grafis: Rihad Humala/Ketik.co.id)

Bantuan Parpol Sidoarjo Cair Separuh, Partai Politik Kecewa

Politik & Pemerintahan



Jurnalis: Fathur Roziq | Editor: Mustopa

Sabtu, 5 Agustus 2023 22:59

KETIK, SIDOARJO – Pimpinan partai politik (parpol) di Sidoarjo mempersoalkan nilai bantuan parpol (banpol) tahun anggaran 2023. Sebab, nilainya balik kucing dari Rp 10 ribu menjadi Rp 5 ribu lagi per suara sah pemilu legislatif.

Padaahal, banpol ini dinilai bisa menjadi instrumen pencegahan korupsi agar partai tak terjerumus.

Kabar itu disampaikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor setelah rapat paripurna di DPRD Sidoarjo Sabtu (5/8/2023). Gus Muhdlor, sapaan Bupati Muhdlor, memastikan bantuan untuk partai politik di Sidoarjo segera terealisasi.

"(SK) sudah saya tandatangi 3 hari lalu. Tidak ada itu (banpol) disandera bupati," kata Gus Muhdlor yang didampingi Ketua DPRD Sidoarjo H Usman MKes dan Wakil Ketua DPRD Dr Emir Firdaus.

Diperkirakan, pada Rabu (9/8) ini, kucuran dana untuk partai-partai politik di Sidoarjo itu bisa cair. Nilai banpol yang bakal cair itu separuh dari anggaran yang tersedia dalam APBD 2023, yaitu Rp 10,06 miliar.

Jumlahnya sama dengan tahun 2021, Rp 5 ribu per suara hasil Pemilu Legislatif 2019 lalu. Nilai pencairan anggaran banpol itu sesuai dengan rekomendasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kenaikan dana banpol harus dimintakan izin ke Gubernur Jatim.

Pemkab Sidoarjo juga telah mengirim surat ke Gubernur Jatim tentang usulan kenaikan nilai banpol dari Rp 5 ribu menjadi Rp 10 ribu pada 2023 ini.

Emir Firdaus yang juga ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sidoarjo berpendapat, sebenarnya Gubernur Jatim tidak perlu keberatan meningkatkan dana banpol. Sebab, partai punya tugas melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya berkualitas dan kredibel. Pemerintah seharusnya justru memberikan perhatian lebih kepada partai politik.

Baca Juga:

[Wartawan Asli FC Diajari Tiki-taka oleh Pelatih Deltras FC Academy](#)

Menurut Emir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja setuju dana parpol dinaikkan pada batas tertentu. Ia mempertanyakan Gubernur Jatim belum meresponsnya. Padahal, pagu dana banpol itu sudah tercantum dalam APBD Sidoarjo. Sudah tidak ada masalah antara bupati dan DPRD Sidoarjo.

"APBD itu juga sudah disetujui Gubernur Jatim dan memiliki nomor registrasi," terangnya.

Di sisi lain, dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) justru melampaui anggaran untuk parpol. Dana banpol kalah dengan hibah untuk ormas. Padahal, ormas tidak dibebani kewajiban melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa.

Anggaran banpol diatur undang-undang. Sedangkan dana hibah ormas tidak diatur undang-undang. Lagi pula, kata Emir, jumlah anggaran banpol dalam APBD itu baru merupakan pagu. Realisasinya bisa sesuai dengan kegiatan faktual parpol dalam menggunakan anggaran.

"Misalnya ada temuan dan bukti-bukti penggunaan tidak sesuai ya harus dikembalikan. Pernah kok partai yang mengembalikan sebagian banpol," ungkap Emir.

Sebelumnya diberitakan, pencairan dana banpol senilai total Rp 10,06 miliar terkatung-katung dalam APBD Sidoarjo 2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo tidak juga mencairkan dana tersebut.

Pada tahun anggaran 2021, nilai banpol Rp 5 ribu per suara sah hasil pemilihan umum legislatif. Pada pembahasan APBD 2022, nilainya naik menjadi Rp 10 ribu per suara sah. Nilainya tetap Rp 10 ribu per suara sah pada 2023 ini.

Nah, muncul kabar bahwa perubahan nilai dari Rp 5 ribu menjadi Rp 10 ribu itu menjadi persoalan. Sebab, ketika mencairkannya pada 2022, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo belum mengantongi persetujuan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.



Gus Muhdlor Didampingi H. Usman menyerahkan Sound System



9

Xpose tv. Live, Sidoarjo – Bupati [Sidoarjo](#) Ahmad Muhdlor Ali didampingi H. Usman di Gedung Podo Joyo Kedungturi, Taman. memberikan bantuan Sound System yang merupakan bagian dari 17 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo untuk memperkuat hubungan sosial antar warga. Bantuan Sound System ke seluruh RT di Kecamatan Taman kemarin malam Rabu (02/08/23) diserahkan.

Bupati Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor berharap bantuan tersebut dapat digunakan untuk mempererat hubungan antara warga. Dipakai untuk menggelar kegiatan kemasyarakatan. Mulai dari kegiatan rapat, kerja bakti, senam sampai tahlilan. Keberadaan sound system tersebut akan mendukung kegiatan berjalan lancar. Oleh karenanya ia berharap keberadaan bantuan ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kerjasama dan solidaritas antara warga Kabupaten Sidoarjo.

“Tujuan dari bantuan ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan komunitas dan acara-acara warga, yang diharapkan dapat mempererat hubungan antara tetangga-tetangga,” ucapnya.

Bupati Gus Muhdlor mengatakan akan ada 8.820 unit sound system portable yang akan dibagikannya. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah seluruh RT di Kabupaten Sidoarjo. Dikatakannya bantuan tersebut bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo kepada RT RW. Disampaikannya peran RT RW dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Butuh keterlibatan RT RW dalam menjalankan roda pembangunan. Oleh karenanya perhatian pemerintah seperti ini dapat menjadi penyemangat mereka untuk ikut memajukan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.